**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

(Studi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007)

**Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar, Indonesia memiliki wadah pendidikan berupa lembaga pendidikan Islam. Bentuknya seperti sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Hanya saja lembaga pendidikan islam tersebut belum dikelola secara optimal. Fakta ini dibuktikan dengan beragam masalah pengelolaan lembaga pendidikan islam baik dari sisi kurikulum, pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, administrasi keuangan, manajemen kelas, dan sarana prasarana lembaga. Kompleksitas permasalahan tersebut perlu segera diselesaikan. Untuk itu, tulisan ini akan mengupas secara rinci permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan islam yang terjadi dan menemukan solusi yang tepat guna memberikan wacana kepada pengelola lembaga pendidikan Islam terkait pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang baik dan benar.

Kata Kunci: Problematika, Pengelolaan, Lembaga Pendidikan Islam, Solusi.

1. **Pendahuluan**

Setiap makhluk di muka bumi ini memiliki kebutuhan terhadap pendidikan. Hal ini karena pendidikan merupakan bekal manusia dalam membangun peradaban dan kesejahteraan. Untuk itu wajar jika lembaga pendidikan didirikan di mana-mana. Tidak terkecuali lembaga pendidikan Islam. Saat ini keberadaan lembaga pendidikan Islam masih dipandang sebelah mata alias belum kompetitif. Stigma ini ada karena dukungan permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan islam yang masih menjamur. Bahkan tidak hanya itu, lembaga pendidikan islam di Indonesia menghadapi pula masalah kualitas, elitisme, dan relevansi terhadap dunia kerja. Banyak kalangan yang belum mempercayai lembaga pendidikan islam sebagai tempat anaknya untuk menempuh pendidikan.Kejadian ini semata disebabkan mereka kurang informasi terkait seluk beluk lembaga pendidikan islam.

Permasalahan lembaga pendidikan islam di Indonesia berada pada taraf mendasar dan multidimensional sehingga sulit dicari ujung pangkal penyelesaiannya. Lebih ironis lagi pendidikan islam yang menaungi lembaga pendidikan islam dianggap jauh lebih bermasalah dibandingkan pendidikan umum yang tampak diidolakan di Indonesia. Tidak sedikit orang malah mengkonotasikan pendidikan islam sebagai bentuk kemunduran dan keterbelakangan.Meskipun saat ini stigma ini berangsur memudar, stigma tetaplah stigma.[[1]](#footnote-1)Sesuatu yang telah dilekatkan lama akan sulit dihilangkan, diperlukan waktu yang cukup untuk kembalikan nama baik lembaga pendidikan islam yang pernah mencapai kejayaan di masanya.

Melihat kenyataan ini, lembaga pendidikan islam perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu caranya dengan mengidentifikasi problematika lembaga pendidikan islam secara mendasar dan multidimensional serta menemukan solusi yang tepat dalam bentuk beragam wacana. Usaha ini perlu dilakukan segera guna mempercepat kemajuan lembaga pendidikan islam di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dengan percepatan yang dilakukan dalam melakukan identifikasi permasalahan lembaga pendidikan islam dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkannya adalah pendidikan islam sebagai sub sistem pendidikan nasional indonesia akan semakin memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Sebab lembaga pendidikan islam sebenarnya sudah memiliki modal yang sangat berharga yaitu dukungan penuh dari umat islam seluruh Indonesia.[[2]](#footnote-2)

Uraian diatas menjadikan penulis merasa perlu untuk mendeskripsikan ide dan gagasan pemberdayaan lembaga pendidikan islam di Indonesia. Uraian akan diawali dengan mendeskripsikan standar pengelolaan lembaga pendidikan di Indonesia yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan, kemudian mengidentifikasi permasalahan secara tepat, dan menemukan resolusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Untuk itu, pertanyaan mendasar dalam tulisan ini adalah sudahkah pengelolaan lembaga pendidikan islam saat ini sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007. Jika dikategorikan belum, lalu permasalahannya dimana, kriteria apa yang belum terpenuhi, dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Semua pertanyaan tersebut akan dikaji secara komprehensif oleh penulis dalam tulisan ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan waacana kepada pengelola lembaga pendidikan islam akan sistem pengelolaan lembaga secara baik dan benar sesuai dengan kaidah atau teori yang telah tersedia. Hal ini dilakukan guna menghindari pengelolaan lembaga pendidikan islam yang dilakukan secara biasa saja.

1. **Pembahasan**

Pembahasan dalam tulisan ini meliputi standar pengelolaan lembaga pendidikan islam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, lalu permasalahan lembaga pendidikan islam dan solusinya. Pertama akan dikaji standar pengelolaan lembaga pendidikan islam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Peraturan ini menyebutkan definisi standar pengelolaan pendidikan islam dalam bab satu poin satu. Secara eksplisit dalam bab satu poin satu disebutkan standar pengelolaan lembaga pendidikan islam adalah standar pengaturan kewenangan dalam penyelenggaran sistem pendidikan islam oleh pengelola lembaga pendidikan islam agar proses pendidikan didalamnya dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.[[3]](#footnote-3)

Pernyataan itu diperjelas dalam bab dua pasal dua yaitu pengelolaan lembaga pendidikan islam dapat dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan yang memperoleh ijin dari pemerintah. Sementara tujuan dari pengelolaan lembaga pendidikan islam disebut dalam pasal tiga yaitu menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi merata, dan terjangkau. Selain itu, pengelolaan lembaga pendidikan islam bertujuan untuk menjamin mutu dan daya saing pendidikan islam serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.Namun sebenarnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitaslah tujuan tercepat yang dapat dicapai pengelola lembaga pendidikan islam.

Mengelola lembaga pendidikan islam tidak mudah karena dibutuhkan kontinuitas dan ketepatan dalam merealisasikan program. Untuk itu, pengelolaan lembaga pendidikan islam perlu didasarkan pada kebijakan nasional pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal pasal empat dan lima yaitu pemangku kebijakan tertinggi bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan, merumuskan kebijakan, dan netapkan kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan islam.Kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan islam perlu didukung pedoman yang jelas dan transparan. Mulai dari rencana lembaga jangka panjang, menengah, maupun pendek. Semua panduan tersebut harus disusun dan direalisasikan dengan mengacu panduan kebijakan pendidikan nasional.

Kebijakan nasional pendidikan Indonesia telah dirancang dengan baik dan terencana sebagaimana diuraikan dalam pasal enam poin dua.Pasal ini menjelaskan pelaksanaan pendidikan agama serta akhlaq mulia, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana belajar, pembiayaan yang sesuai prinsip pemerataan dan keadilan, penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan merata, pelaksanaan wajib belajar dan otonomi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan sistem pendidikan.

Pasal ini menunjukkan persiapan pengelolaan lembaga pendidikan islam di Indonesia sudah sangat jelas dan transparan. Karena itu, pengelola lembaga pendidikan islam hanya perlu mengarahkan, membimbing, mengawasi, mengkoordinir, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikaan penyelenggaraan pendidikan mulai dari satuan kerja, jalur, jenang, dan jenis pendidikan. Menurut penulis, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa pemangku kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan islam tertinggi memiliki tanggung jawab untuk mengelola lembaga pendidikan islam sesuai dengan standar yang berlaku.

Kedua, standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007.Standar pengelolaan lembaga pendidikan islam dalam peraturan ini meliputi lima aspek yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen lembaga.[[4]](#footnote-4)Aspek perencanaan program meliputi ketersediaan visi, misi, tujuan, sasaran mutu, rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana tahunan lembaga pendidikan islam. Setiap lembaga pendidikan islam wajib memiliki dokumen ini jika ingin maju. Aspek pelaksanaan program meliputi pengaturan struktur lembaga, penyusunan pedoman pengelolaan lembaga pendidikan islam, dan realisasi program berdasarkan pedoman yang telah disusun.

Untuk melengkapi aspek pelaksanaan program maka diperlukan kontinuitas berupa monitoring dan evaluasi terhadap setiap realisasi program. Tujuan yang ingin dicapai adalah memastikan program berjalan dengan baik dan tercapai. Jika pun belum maka dapat diidentifikasi permasalahannya untuk kemudian dipecahkan dan ditindak lanjuti dengan lanjutan program baru atau dihentikan program itu jika dianggap tidak relevan lagi. Selanjutnya aspek kepemimpinan. Setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa dan siapa yang dipimpinnya. Ini menunjukkan kepemimpinan memiliki peranan besar dalam mensukseskan pengelolaan lembaga pendidikan islam. Untuk itu, pengelola lembaga pendidikan islam perlu berhati-hati dalam melakukan pengelolaan supaya tidak salah dalam mengelola lembaga.

Aspek terakhir yaitu dukungan sistem informasi manajemen lembaga. Sistem ini diperlukan guna mendukung administrasi dan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Karena dukungan pengelolalembaga pendidikanislam untuk menyediakanfasilitas sistem informasimanajemen lembaga yang efisien, efektif, dan mudahdiakses menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan islam. Aspek yang telah disebut tadi adalah satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Untuk itu, pengelola lembaga pendidikan islam perlu memperhatikan secara seksama kelima aspek tersebut.

Ketiga adalah problematika pengelolaan lembaga pendidikan. Sebelum mengkaji lebih jauh problemtaika lembaga pendidikan islam, alangkah baiknya kita mengetahui jenis lembaga pendidikan islam yang dikenal di indonesia seperti sekolah islam, madrasah, dan pondok pesantren.Wujudnya biasanya dikenal mulai raudhatul athfal hingga perguruan tinggi keagamaan dan pondok pesantren dengan kekhususan yang dimilikinya.Untuk mengetahui problematika pengelolaan lembaga pendidikan islam secara mendasar dan multidimensional perhatikan uraian apik dan lugas berikut ini.

1. Problem ideologi dan pemikiran

Problem ini bisa jadi muncul dalam pengelolaan sebuah lembaga pendidikan islam baikdari sisi lembaga maupun individu. Tidak sedikit lembaga pendidikan islam menjadi mandeg akibat terjangkit virus ini. Akibatnya pengelolaan lembaga pendidikan islam menjadi tidak tertata. Anehnya konflik ini sering kali dibiarkan bahkan sengaja dibuat tumbuh subur. Misalnya, kalangan Nahdatul Ulama membuat kelompok, kalangan Muhammadiyah membuat kelompok, kalangan Persis membuat kelompok, dan seterusnya. Kenapa tidak membaur menjadi satu untuk kemajuan lembaga pendidikan islam ?, kenapa harus berjuang sendiri-sendiri tanpa adanya dialog dan diskusi ?.Realitas ini memang ironis, tetapi apa mau dikata, fakta menunjukkan demikian, dan rakyat indonesia sangat sensitif jika terkait dengan permasalahan aliran dan kelompok.

Problem lain terkait ideologi dan pemikiran adalah kakunya pemikiran dan ideologi pengelola lembaga pendidikan dan pengikutnya memiliki. Kejadian ini biasanya muncul di kalangan pondok pesantren salaf.Kakunya pemikiran sang kyai tidak jarang merugikan lembaga dan santri.Sebagai contoh adalah tidak diijinkannya penggunaan teknologi informasi di lingkungan pesantren. Memang teknologi informasi dapat membawa kerusakan kepada santri, tetapi disisi lain sang kyai perlu melihat juga manfaat teknologi informasi. Sebenarnya kunci dari problem ini adalah mekanisme kontrol dan evaluasi.Jika teknologi informasi digunakan dengan baik dan benar maka semua dapat berjalan sesuai harapan.

1. Problem pengelolaan dokumen lembaga

Problem ini hampir dialami oleh seluruh lembaga pendidikan islam di Indonesia terutama yang salah kelola. Umumnya, derivasi problem ini adalah tidak tersedianya dokumen visi, misi, tujuan, sasaran mutu, rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana tahunan, kurikulum, administrasi dan keuangan lembaga pendidikan islam. Padahal semua dokumen tersebut adalah dokumen utama yang perlu dimiliki setiap lembaga pendidikan islam. Sungguh ironis bukan kondisi lembaga pendidikan islam yang salah kelola.Jikapun dokumen tersebut dimiliki, biasanya tidak tertata rapi dan tidak jelas letaknya dimana. Terkadang pengelola lembaga pendidikan islam malah memiliki versi dua versi atau lebih dari setiap dokumen yang dibutuhkan.

Sebagai contoh adalah pengelolaan kurikulum lembaga pendidikan islam. Tahapan ideal pengelolaan kurikulum adalah perencanaan penyusunan kurikulum lembaga, pengorganisasian dan pengorganisasian penyusunan kurikulum lembaga, realisasi kurikulum lembaga dalam pembelajaran, dan pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kurikulum. Secara rinci uraian siklus perencanaanpenyusunan kurikulum lembaga terwujud dalam bentuk melakukan analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, dan menentukan desain kurikulum dengan beragam inovasi.

Siklus pengorganisasian dan pengorganisasian penyusunan kurikulum lembaga terwujud dalam bentuk perumusan dasar pemikiran didirikannya lembaga, perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga, penentuan struktur lembaga dan program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran; pemilihan sumber belajar, alat, dan sarana belajar; dan penentuan cara pengukuran hasil belajar yang semuanyaperlu dirangkum dalam sebuah dokumen kurikulum sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

Siklus realisasi kurikulum dimulai dengan penyusunan rencana dan program pembelajaran,penjabaran materi pembelajaran, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber belajar, alat, sarana pembelajaran, instrumen penilaian pembelajaran, dan laporan evaluasi pembelajaran. Rincian siklus ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan. Penilailain kurikulum umumnya mencakup konteks, input, proses, dan produk.Penilaian konteks dapat memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, permasalahan, dan peluang. Penilaian Input pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi desain dan *cost benefit* dari rancangan. Penilaian proses pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian produk pada pengukuran pencapaian proses.

Namun demikian semua siklus pengelolaan kurikulum bukan berarti tidak dijalankan di lembaga pendidikan islam, umumnya sudah dilakukan hanya saja belum lengkap. Kecuali lembaga pendidikan islam yang tidak dikelola dengan baik dan benar. Pastilah mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang menjadi kelengkapan sebuah lembaga pendidikan islam.

1. Problem pengelolaan sumber daya manusia.

Problem ini dapat dikaji dari aspek pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Aspek pendidik misalnya, masalah yang sering muncul adalah kompetensi pendidik dipertanyakan, over load tugas, kreativitas dan produktivitas pendidik kurang, dan pengelola lembaga pendidikan tidak memiliki konsep pengelolaan lembaga yang jelas dan transparan, jiwa *leader* dan *great manager*minim. Aspek tenaga kependidikan, masalah yang sering muncul adalah kualitas layanan rendah, personal life kurang bersahabat, sering tidak ditempat kerja, dan kompetensi kurang. Aspek peserta didik, masalah yang sering muncul adalah input peserta didik rendah, kenakalan peserta didik, kesulitan belajar peserta didik, konflik antar peserta didik, perhatian pendidik kurang, kebiasaan bertanya dikalangan santri kepada sang kyai yang dianggap sebagai bentuk su’ul adab, dan kepribadian ganda peserta didik.

1. Problem pengelolaan administrasi dan keuangan

Pegelolaan administrasi dan keuangan merupakan aspek penting dalam konteks pengelolaan lembaga pendidikan islam.Karena itu, panduan, pedoman, dan standar operasional prosedur pengelolaan administrasi dan keuangan perlu dimiliki dan dipahami oleh setiap insan pendidikan dalam lembaga pendidikan islam. Problem ini terkadang muncul karena memang minimnya informasi tata cara pengelolaan administrasi dan keuangan yang diterima oleh pengelola lembaga pendidikan islam dan pengikutnya. Meskipun ada pula lembaga pendidikan islam yang sengaja cuek dengan sistem administrasi dan keuangan.

Sebagai contoh kasus, di kalangan pondok pesantren salaf, sistem administrasi dan keuangan cenderung tidak rapi. Hal ini terkadang disebabkan oleh sebuah prinsip, semua “nderek” dawuh kyai.Jika pun ada biasanya tidak sesuai dengan standar aturan sebuah pelaporan.Padahal laporan yang sesuai standar diperlukan guna mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas lembaga pendidikan islam. Permasalahan lain terkait administrasi dan keuangan lembaga adalah kurangnya dan terbatasnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan islam. Hal ini tampak jelas pada sulitnya mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Sehingga pengelola lembaga pendidikan islam hanya mengandalkan dana donatur dan yayasan.

Akibat dari problem pengelolaan administrasi dan keuangan yang terjadi adalah lembaga pendidikan islam menjadi tidak cepat berkembang, administrasi berantakan, tidak ada kejelasan dalam pertanggung jawaban keuangan, tidak bisa meneliti darimana dan bagaimana penggunaan dana, jika donatur tidak ada dan harta pemilik yayasan kurang maka lembaga pendidikan islam akan kesulitan dana, sirkulasi dan regulasi keuangan menjadi tidak jelas,dan memungkinkan terjadinya monopoli keuangan oleh pengelola lembaga pendidikan islam.

1. Problem pengelolaan kelas dan sarana prasarana

Problem pengelolaan kelas dapat ditinjau dari aspek kemampuan pendidik dalam mengelola kelas dan peserta didik dalam mendesain keindahan kelas. Perlu disadari bahwa pengelolaan kelas adalah hal penting dalam pembelajaran. Untuk itu, pelaksanaan administrasi pendidikan. kepemimpinan pendidikan, dan kedisiplinan oleh pendidik sangat dibutuhkan. Selain itu, desain keindahan kelas perlu pula diperhatikan sehingga suasana belajar peserta didik menjadi nyaman. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kerjasama yang apik antara pengelola lembaga pendidikan dan pengikutnya dengan pendidik baik yang bersifat materiil maupun non materiil.

Sementara untuk problem sarana prasarana terdiri dari dua hal yaitu kurangnya sarana prasarana yang tersedia dan rendahnya kualitas perawatan sarana prasarana yang dilakukan. Namun secara umum problem sarana prasarana lembaga pendidikan islam dapat dipetakan menjadi tujuh hal yaitu sebaran sarana pendidikan tidak merata, sarana prasarana tidak mencukupi, kualitas sarana prasarana rendah, sarana prasarana penunjang rusak, perawatan kurang, dana terbatas, dan mekanisme inventrasisasi sarana prasarana tidak berjalan.

1. Problem pengelolaan hubungan dengan masyarakat

Problem pengelolaan komunikasi lembaga pendidikan islam dengan masyarakat mungkin terjadi ketika lembaga maupun individunya menutup diri dari masyarakat. Kondisi ini seringkali terjadi di Indonesia dimana beberapa lembaga pendidikan islam yang dikelola oleh aliran tententu hanya berkomunikasi dengan rekan sealiran dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Padahal pengelolaanhubungan lembaga pendidikan islam dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu.Penulis meyakini bahwa lembaga pendidikan islam tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hubungan yang serasi, terpadu,dan timbal balikantara lembaga pendidikan islam dengan masyarakat harus diciptakan dan dilaksanakan agar mampu meningkatkan mutu pendidikan lembaga pendidikan islam dan pembangunan masyarakat.

Keempat, solusi terhadap problem pengelolaan lembaga pendidikan islam diuraikan penulis dengan penataan kembali lembaga pendidikan islam. Berdasarkan problempengelolaan lembaga pendidikan islam diatas maka penulis menguraikan beragam solusi. Mari kita mulai dari penyelesaian problem perbedaan ideologi dan pemikiran.Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan strategi kolaborasi dan strategi kompromi. Strategi kolaborasi digunakandengan cara memuaskan kedua belah pihak atau lebih yang konflik. Sementara strategi kompromi digunakan dengan mekanisme saling menawarkan sesuatu di waktu bersamaan dan saling menerima kekurangan,sehingga tercipta kondisi yang saling menguntungkan.[[5]](#footnote-5)

Strategi kolaborasi dan kompromi ini dapat dipraktikkan dengan cara masing-masing pihak mengirimkan perwakilan yang dipercayai untuk kolaborasi, kompromi atau negosiasiguna menyelesaikan masalah. Kemudian masing-masing pihak mentaati kesepakatan yang telah terjalin. Jika ada salah satu pihak melanggar kesepakatan maka perjanjian dianggap batal atau dikenakan sanksi.

Selanjutnya adalah penyelesaian problem pengelolaan dokumen lembaga. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara menyusun (jika belum ada) dan melengkapi (jika sebagian ada) dokukemen lembaga. Dokumen yang perlu dimiliki lembaga pendidikan islam adalah dokumen visi, misi, tujuan, sasaran mutu, rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana tahunan, kurikulum, administrasi dan keuangan, serta dokumen monitoring dan evaluasi lembaga pendidikan islam.Untuk mewujudkan dokumen tersebut, langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu pengelola membentuk tim penyusun dokumen, tim menyusun dokumen, lokakarya, finalisasi dokumen, pengesahan dokumen oleh pejabat berwenang, sosialisasi dokumen, realisasi dokumendalam bentuk aktivitas yang kreatif dan inovatif

Adapun penyelesaian problem pengelolaan sumber daya manusia dapat diselesaikan melalui tiga aspek. Problem yang muncul dari aspek pendidik dapat diselesaikan dengan peningkatankompetensi, kreativitas, dan produktivitasmelalui pelatihan, *lecturer exchange, short course,international conference,* tugas belajar dan program lainnya yang mendukung; menghindari *over load* tugas;dan pelatihan kepemimpinan dan konsep pengembangan lembaga pendidikan islam. Untuk problem yang muncul dari aspek tenaga kependidikan dapat diselesaikan melalui pelatihan layanan akademik dan non akademik, pelatihan personal life,dan pemberian kesempatan studi lanjut. Problem yang muncul dari aspek peserta didik dapat diselesaikan dengan cara menetapkan standar input peserta didik yang tinggi, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku peserta didik, pelatihan belajarefektif bagi peserta didik, memperbanyak kegiatan silaturahim antar peserta didik, meningkatkan perhatian kepada peserta didik, menghilangkan stigma bertanya dikalangan santri kepada sang kyai sebagai bentuk su’ul adab melalui pemahaman yang logis dan sistematis, dan membangun kepribadian luhur peserta didik melalui *islamic character building*.

Sementara problem pengelolaan administrasi dan keuangan dapat diselesaikan melalui penyusunan pedoman pengelolaan administrasi dan keuangan, penggunaan aplikasi atau sistem informasi manajemen administrasi dan keuangan, dan monitoring evaluasi layanan administrasi dan keuangan. Jika dirinci dalam bentuk aktivitas maka dapat dilakukan dengan cara pemangku kebijakan membentuk tim penyusunanpanduan, tim menyusun panduan, lokakarya, finalisasi dokumen panduan, pengesahan dokumen, sosialisasi dokumen panduan, realisasi dokumen panduan;penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan administrasi dan keuangan, dan monev layanan administrasi dan keuangan. Jika panduan telah selesai disusun maka perlu diimplementasikan, jangan diabaikan. Sayangnya penyakit individu saat ini terkadang mereka mengabaikan panduan dalam menjalan setiap layanan yang diberikan.

Problem pengelolaan kelas dapat diselesaikan melalui kerjasama apik antara pengelola lembaga pendidikan dengan guru dan peserta didik. Misalnya dalam pembelajaran, menghias keindahan,dan menata kerapihan kelas. Sementara problem sarana prasarana pendidikan dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang tersedia, perawatan sarana prasarana secara rutin, dan inventrasisasi sarana prasarana secara berkala. Selain itu, dukungan dana dari pengelola lembaga pendidikan juga diperlukan supaya sarana prasarana yang dimiliki lembaga menjadi lebih baik.

Terakhir problem pengelolaan hubungan dengan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara menghindari ekslusivitas antara lembaga maupun individunya dengan masyarakat. Sebagai contoh melakukan kegiatan dan program bersama masyarakat atau melibatkan perwakilan masyarakat dalam program lembaga pendidikan. Cara ini akan ampuh dalam menjaga komunikasi atau hubungan dengan masyarakat sekitar.

1. **Penutup**

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Peratutarn Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendiidkan oleh Satuan Pendidikan. Namun pengelolaan lembaga pendidikan islam masih saja memiliki permasalahan ideologi dan pemikiran, problem pengelolaan dokumen lembaga, problem pengelolaan sumber daya manusia, problem pengelolaan administrasi dan keuangan, problem pengelolaan kelas dan sarana prasarana, dan problem pengelolaan hubungan dengan masyarakat.

Meskipun demikian, kita perlu terus melangkah maju dengan menetapkan beragam solusi. Adapun solusi guna menyelesaikan permasalahan yang muncul telah disebutkan penulis dalam bab pembahasan. Namun satu hal yang pasti ke depan lembaga pendidikan islam perlu bertansformasi secara cepat sehingga menjadi lebih baik dan maju agar lembaga pendidikan islam mampu menjadikan pusat dan rujukan pengembangan ilmu dan pengetahuan.

**Daftar Pustaka**

Miall, Hugh. 2001, Berghof handbook for conflict transformation. Austin, A. & Ropers, N. (eds.). Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan.

Peratutarn Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendiidkan Oleh Satuan Pendidikan.

Soeroyo. 1991. Berbagai Persoalan Pendidikan: Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. I, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suyata. 1992. *Penataan Kembali Pendidikan Islam pada Era Kemajuan Ilmu dan Teknologi*, Jurnal UNISIA, Vol 1. No. 12, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1. Soeroyo, Berbagai Persoalan Pendidikan: Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Juli 1991, Vol. I, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 77. [↑](#footnote-ref-1)
2. Suyata, *Penataan Kembali Pendidikan Islam pada Era Kemajuan Ilmu dan Teknologi*, Jurnal UNISIA, 1992, Vol 1. No. 12, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 23. [↑](#footnote-ref-2)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan. [↑](#footnote-ref-3)
4. Peratutarn Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendiidkan Oleh Satuan Pendidikan. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hugh Miall, Berghof handbook for conflict transformation. Austin, A. & Ropers, N. (eds.). Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management (2001), hlm 17. [↑](#footnote-ref-5)